

## TAJUK RENCANA

## Jangan hanya Semangat

INSTRUKSI Presiden RI Joko Widodo, agar seluruh instansi dan lembaga pemerintah, khususnya yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, benar-benar memberantas tindakan pungutan liar (Pungli), tampaknya mulai direspon oleh pemerintah daerah (Pemda), termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) DIY di Mapolda DIY, Selasa (1/11). Satgas yang beranggotakan dari unsur Pemda DIY, Polda, TNI, Kejaksaan Tinggi DIY dan instansi terkait lainnya, kata Gubernur DIY, berwenang membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungli, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) serta menyusun laporan tugas secara periodik.

Saat ini, Pemerintah Daerah DIY sedang memperkuat infrastruktur pelaporan dan tim satuan tugas (Satgas) yang akan memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait sanksi yang akan diberikan kepada para pelaku. Satgas ini memiliki empat kewenangan, yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Komitmen untuk melakukan pemberantasan terhadap pungutan ilegal yang biasa dilakukan oleh sejumlah oknum aparat pemerintah setempat, memang membutuhkan keberanian dan nyali yang besar, mengingat sudah kronisnya penyakit Pungli di lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan pelayanan publik.

Meskipun terjadinya tindakan Pungli tersebut tidak semata-mata dari oknum aparat, namun juga dari masyarakat yang ingin pelayanannya lebih mudah dan lebih cepat sehingga berani *nyogok*. Hal tersebut tentu menjadi tantangan bagi Gubernur dan Satgas Saber Pungli untuk mengambil sikap tegas, jika benar-benar ingin memberantas Pungli. Tidak hanya sekadar semangat saja, namun juga tindakan nyata yang harus ditunjukkan kepada masyarakat.

Agar tindakan pemberantasan pungutan liar itu lebih efektif, Kapolda DIY Brigjen (Pol) Prasta Wahyu Hidayat yang ikut hadir dalam pengukuhan Satgas Saber Pungli itu, berharap pelaporan praktik Pungli sedapat mungkin dilengkapi dengan bukti. Mereka bisa melapor melalui aplikasi "Polisi Kita" atau lewat call center 0274-886000, karena Kapolda DIY sendiri adalah Pelindung I dari Satgas Saber Pungli yang dibentuk Pemda DIY tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum, pungutan liar yang biasa dilakukan aparat pemerintah biasanya terjadi di lingkungan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat saat akan mengurus administrasi yang diperlukan. Biasanya, dengan alasan biaya administrasi, petugas yang memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut meminta biaya tambahan di luar aturan yang ada, setelah mereka mengerjakan atau melayani pembuatan berkas administrasi yang dibutuhkan masyarakat tersebut.

Padahal, aparat pemerintah memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan para petugas, di instansi yang bersentuhan langsung dengan publik tersebut. Meskipun biaya tambahan yang diminta petugas tidak besar dan masih dijangkau masyarakat, tetap saja hal itu adalah Pungli dan lakunya sudah melakukan sebuah tindakan melanggar hukum.

Jika kondisi tersebut masih dialami masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan, sudah seharusnya masyarakat berani menolak. Tidak hanya itu saja, partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan, di antaranya dengan melaporkan kejadian itu kepada Satgas Saber Pungli yang baru dibentuk Pemda DIY tersebut. Karena tindakan ini akan membantu Satgas dalam mengungkap aksi-aksi pungutan liar yang terjadi di dalam masyarakat selama ini.

Memang sampai saat ini kita belum mendengar ada laporan dari masyarakat atau ada temuan di lapangan, di wilayah DIY, khususnya yang melakukan Pungli. Namun demikian sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu program reformasi di bidang hukum yang telah dicanangkan Presiden Jokowi, maka sudah seharusnya Satgas Saber Pungli DIY yang baru dibentuk itu segera beraksi sesuai kewenangannya, yakni intelijen, pencegahan, penindakan dan yustisi.

Karena tugas dari Satgas Saber Pungli tidak hanya menangkap dan menindak para pelaku Pungli, atau mereka yang diduga ikut terlibat dalam aksi kongkalikong itu, namun juga mencegah agar nun-



## Isu Pendidikan dan Pilkada

Oleh: Riza Multazam Luthfy

DARI tahun ke tahun, kita terlalu sibuk mencari kelemahan Ujian Nasional (UN). Mulai dari soal yang bocor di internet, kecurangan panitia dan pengawas, hingga tertundanya hajatan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut di sejumlah sekolah lantaran kesalahan teknis. Kita terlalu memfokuskan perhatian pada apa-apa yang terjadi saat UN digelar. Celakanya, jarang sekali kita mengamati segala hal yang datang setelah UN. Padahal, evaluasi semestinya tidak terbatas pada penyelenggaraan UN, melainkan juga dampak bawaannya.

Kita enggan berpikir bahwa diselenggarakannya UN ternyata melahirkan kesenjangan sosial (*social gap*), baik antarsekolah maupun pengawas. Sekolah yang tergolong *high class* dapat memberikan pelayanan ekstra kepada pengawas dengan menghadirkan sajian serba mewah. Ruang tempat mangkal pengawas dipermak dengan beragam hiasan dan pengharum ruangan. Meja, pintu, jendela, dinding dicat. Toilet dan wastafel dibersihkan. Sekolah tiba-tiba berubah menjadi hotel dengan pelayanan dan fasilitas memuaskan. Sementara itu, sekolah berkategori *low class* hanya sanggup menghadirkan makanan dan minuman seadanya. Di dalam gedung yang hampir roboh, usai menyampaikan sambutan dan ucapan selamat datang kepada pengawas, kepala sekolah dengan rendah hati bertutur "mohon maaf, sekolah kami tidak bisa memberikan hal yang berarti".

Meskipun dana bantuan operasional UN, seperti belanja alat tulis kantor, ruangan, dan honor pengawas, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekolah kategori pertama masih bisa memanfaatkan kas sekolah. Tak ayal, pengawas-pengawas UN di sana lebih sejahtera dibanding di sekolah kategori kedua, karena selain menikmati fasilitas cukup memadai, mereka me-

nerima honor lebih tinggi. Situasi seperti ini rentan menjatuhkan mental guru-guru yang menjadi pengawas di sekolah kategori kedua.

Munculnya konsensus tak tertulis: "semakin bagus pelayanan, semakin besar peluang keberhasilan UN" menyebabkan sekolah-sekolah saling berlomba memanjakan para pengawas. Uang transpor, uang lelah, maupun uang tanda terima kasih sengaja diselipkan sebagai upaya 'pengondisian'. Maka, kecurangan-kecurangan selama UN berlangsung, semisal kerja sama antarpeserta, ditemukannya *handphone* di ruang ujian, dan disembunyikannya kunci jawaban di bagian tubuh tertentu, di antaranya disebabkan kurang maksimalnya pengawas mengemban tugas.

Belum lagi ketimpangan sosial antarpara guru honorer. Bagi mereka, UN merupakan hajatan besar yang dinantikan. Alasannya sederhana: honor kerja tiga hari menyamai, atau bahkan melebihi, gaji sebulan. Maka, berbanggalah mereka yang mengantongi Surat Keputusan (SK) sebagai pengawas di sekolah *high class*. Adapun yang ditakdirkan menjadi pengawas sekolah *low class* hanya bisa gigit jari. Sudah tentu hal ini membawa pengaruh disharmoni lingkungan pendidikan.

Kenyamanan dan keguyuban yang sebelumnya dirasakan oleh para guru berubah menjadi kecemasan, kecurigaan serta iri hati. Konstruksi harmoni yang sudah lama terbentuk hancur berkeping-keping. Teologi kerukunan yang mereka bangun roboh dengan sendirinya. Dengan demikian, ada kecenderungan hegemonisasi yang terintrodusir secara sistematis di bawah payung materi. Kondisi ini memperkuat tesis Pierre Bourdieu, bahwa pendidikan cenderung menjadi instrumen reproduksi kelas dan bukannya

instrumen mobilitas sosial.

## Makelar Pilkada

Wacana penghapusan UN dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk memanfaatkan guru dengan tingkat ekonomi rendah. Mereka dapat membaca bahwa dihapusnya UN berimbas pada hilangnya pendapatan guru pada agenda tahunan tersebut. Menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) banyak siasat yang ditempuh para simpatisan, relawan, dan tim sukses untuk mengantar seseorang meraih tampuk kekuasaan. Di antaranya, mereka menggandeng guru untuk aktif berpartisipasi dalam kampanye. Tugas guru yang strategis sangat potensial dijadikan boneka politik. Guru dapat difungsikan sebagai penggiring para pemilih pemula untuk menjatuhkan keputusannya.

Momentum konstitusional bagi rakyat untuk memilih pemimpin yang jujur, bersih, dan kompeten terkontaminasi oleh hal-hal yang tak diinginkan. Sarana penentu aktor-aktor pengemudi bangsa mendapat ancaman serius dari para pembajak ruang publik yang berhasrat mengeruk keuntungan baik politis, sosial, maupun finansial.

Berdalih mengarahkan siswa pada "pilihan" yang paling baik dan tepat, guru leluasa memanfaatkan posisinya dalam mewujudkan ekspresi politik siswa. Guru bisa saja meletakkan identitas siswa dalam bingkai politik. Di sinilah tercipta jejaring politis yang membentuk relasi antar-berbagai aktor dalam panggung politik. Mobilisasi massa berlangsung demi meramaikan drama dan sandiwara politik. Dengan demikian, secara sadar maupun tidak, guru telah menjadi korban politisasi.

Parahnya, politisasi guru tidak hanya berhenti sampai di sini. Beragam modus

lahir dengan tujuan menyeret guru ke dalam pusaran arus kepentingan. Antara lain penyelenggaraan pertemuan guru dengan tim sukses, upaya menjadikan guru sebagai alat sosialisasi, alih fungsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kapitalisasi program-program pendidikan, serta mobilisasi dukungan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendidikan.

Modus-modus ini sengaja dimunculkan demi melempar iming-iming dan janji busuk bagi para guru. Bukan mustahil, sebagai guru PNS, ada yang berniat menambah pundi-pundi kekayaan melalui jalur politis. Seberapa pun gaji yang diterima, jika dalam diri guru tersimpan hasrat "*kemaruk*", maka mereka akan menempuh berbagai jalan, termasuk menjadi bagian dari kampanye.

Belum lagi guru honorer yang terkesan kurang fokus pada profesinya. Di luar jam mengajar, mereka kerap "*nyambi*" dalam berbagai bidang pekerjaan lain. Hal ini dilakukan bukan lantaran kurangnya kepedulian mereka terhadap masa depan siswa dan perkembangan dunia pendidikan pada umumnya, melainkan karena kebutuhan hidup yang mendesak. Bagaimana pun, gaji rendah tak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tipe guru semacam ini juga tak luput dari incaran tim sukses. Dengan sekuat tenaga, tim sukses berusaha mendekati guru honorer.

Gayung pun bersambut. Di tengah sulitnya membuat dapur terus mengepul, mereka bersedia melancarkan misi politis. Dalam konteks ini, problem ekonomi dan sosial yang membelit guru honorer berhasil dimanfaatkan oleh calon kepala daerah, calon legislatif, dan calon presiden, guna memperoleh dukungan sebanyak mungkin. \*\*

Riza Multazam Luthfy  
Mahasiswa Program Doktor  
Ilmu Hukum UII Yogyakarta